

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN
PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
KINERJA PEMERINTAH DESA
(Studi: Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten
Way Kanan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)

Oleh:

SINTA AMELIA

NPM. 1951030362

Program Studi Akuntansi Syariah



**PRODI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN
PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
KINERJA PEMERINTAH DESA
(Studi: Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way
Kanan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)

Oleh:

SINTA AMELIA

NPM. 1951030362

Program Studi Akuntansi Syariah

Pembimbing Akademik I : H. Supaijo, S.H., M.H
Pembimbing Akademik II : Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt.

PRODI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M

ABSTRAK

Akuntansi sektor publik sangat erat kaitannya dengan penerapan dan juga perlakuan akuntansi pada domain publik. Sektor publik itu sendiri lebih luas dan lebih kompleks daripada sektor swasta. Salah satu yang menjadi prioritas pemerintah pusat dalam pembangunan desa adalah penyediaan pembiayaan desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Oleh karenanya, dirumuskan masalah yang pertama bagaimana akuntansi sektor publik yang diterapkan pada pemerintah desa Kayu Batu? kedua: bagaimana pengalokasian dana desa pada desa Kayu Batu? dan ketiga: bagaimana akuntansi sektor publik dan pengalokasian dana desa yang diterapkan dalam perspektif Islam pada pemerintah desa Kayu Batu bisa meningkatkan kinerja? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi sektor publik dan pengalokasian dana desa dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa kayu batu kecamatan gunung labuhan kabupaten way kanan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi lalu dianalisis dengan metode analisis model *Miles and Huberman*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: pemerintah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Kedua: meski dalam penerapannya terlihat di setiap tahun anggaran dana yang dianggarkan dengan dana yang terealisasi tidak sesuai tetapi pemerintah desa Kayu Batu telah menjalankan tugasnya dengan baik dibidangnya. Namun yang menjadi perhatian terhadap penilaian masyarakat khususnya dibidang kualitas layanan yang masih perlu di perbaiki demi terpenuhinya harapan masyarakat. ketiga: pemerintah desa Kayu Batu tidak sepenuhnya menjalankan amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pentingnya akuntabilitas dalam mengelola harta untuk amanah.

Kata kunci: Akuntansi Sektor Publik, Alokasi Dana Desa, Kinerja Pemerintah Desa

ABSTRACT

Public sector accounting is closely related to the application and treatment of accounting in the public domain. The public sector itself is broader and more complex than the private sector. One of the priorities of the central government in village development is the provision of village financing in the form of Village Fund Allocation (ADD). Therefore, the first problem is formulated, how is public sector accounting applied to the village government of Kayu Batu? second: how is the allocation of village funds in Kayu Batu village? and third: how can public sector accounting and village fund allocation applied from an Islamic perspective in the Kayu Batu village government improve performance? This research aims to determine the application of public sector accounting and the allocation of village funds in improving the performance of the Kayu Batu village government, Gunung Labuhan subdistrict, Way Kanan district. This research uses a type of field research with a qualitative approach. The data used in this research is primary data with data collection techniques through observation, interviews and documentation and then analyzed using the Miles and Huberman model analysis method. The results of the study show that, first: the government applies the application of the village financial system (siskeudes). Second: although in its implementation it can be seen that in each year the budget budgeted and the realized funds do not match, the Kayu Batu village government has carried out its duties well in its field. However, what is of concern is the community's assessment, especially in the field of service quality, which still needs to be improved in order to fulfill community expectations. third: the village government of Kayu Batu does not fully carry out the mandate given by the central government for the welfare of its people. The importance of accountability in managing assets for trust.

Keywords: Public Sector Accounting, Village Fund Allocation, Village Government Performance

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinta Amelia
NPM : 1951030362
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengalokasian Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa (Studi: Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan dupikasi ataupun karya dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dalam catatan kaki atau dalam daftar rujukan. Apabila suatu waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 30 September 2023

Penulis



Sinta Amelia
1951030362



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Letkol Hi. Endro Sutarmim Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengalokasian Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa (Studi: Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)

Nama : Sinta Amelia
NPM : 1951030362
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Supatio, S.H., M.H
NIP. 196503121994031002


Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt
NIP. 198510302019031004

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah


A. Zuliyanah, S. Si., M.M
NIP. 198302222009121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Letkol Hi, Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengalokasian Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa (Studi: Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)”**, disusun oleh: **Sinta Amelia**, NPM: 1951030362, Jurusan Akuntansi, Syariah telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua: **Dr. Madnasir, S.E., M.S.I**

Sekretaris: **Yeni Susanti, S.Pd., M.A**

Penguji I: **Nur Wahyu Ningsih, SiE, M.S.Ak., Akt.**

Penguji II: **H. Supaijo, S.H., M.H.**

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A

NIP. 19700926200811008



MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
 بَصِيرًا

Artinya: “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*”. (Q.S An-Nisa’: 58)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Qur’an Kemenag* (Jakarta:2019)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan juga syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT yang telah mengatur segala kehidupan di bumi dengan sebaik-baiknya. Sholawat beserta salam tak lupa dihaturkan kepada suri tauladan yaitu baginda nabi Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa syukur dan tulus serta maka skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta yaitu Ayahanda Edi Sofyan dan Ibunda tercinta Eliyati yang senantiasa memberikan kasih sayang yang selalu menguatkan dan doa yang selalu menyertai disetiap langkahku demi tercapainya cita-cita dan kesuksesanku. Segala bentuk nasihat bimbingan dan arahan yang begitu luar biasa, doa yang tulus, begitu banyak jasa, pengorbanan yang sudah dilakukan demi kebahagiaanku, tidak pernah ada kata lelah dalam mencari rezeki tidak peduli panas terik matahari dan hujan.

Semoga Allah SWT selalu melindungi dan menjaga kedua orang tua ku dan melimpahkan rezeki yang halal untuk keluarga kecilku. Dan teruntuk almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Sinta Amelia lahir di Kayu Batu 01 September 2001 adalah anak tunggal dengan orang tua bernama Bapak Edi Sofyan dan Ibu Eliyati.

Penulis mulai menempuh Pendidikan di SDN 1 Kayu Batu yang diselesaikan pada tahun 2013, penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 2 Gunung Labuhan yang diselesaikan pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMKN 1 Bukit Kemuning Lampung Utara dan diselesaikan pada tahun 2019.

Dengan dukungan penuh dari kedua orang tua beserta keluarga besar serta tekad yang kuat dan mengharapakan Ridho dari Allah SWT. Di tahun 2019 penulis kembali melanjutkan Pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Akuntansi Syariah. Pada bulan Juni 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Bonglai dusun Bangun Sari kecamatan Banjit kabupaten Way Kanan.

Bandar Lampung, 30 September 2023

Penulis

Sinta Amelia

1951030362

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur atas rahmat, hidayah dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengalokasian Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita nabi besar Muhammad SAW semoga mendapatkan syafaatnya yang selalu kita nanti-nantikan di yaumul akhir kelak aamiin yarabbalalamin.

Skripsi adalah bagian akhir untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana akuntansi syariah dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah (AKS) UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
2. A. Zuliyansah., S.Si., M.M selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah
3. H. Supaijo, S.H., M.H selaku pembimbing I, yang senantiasa sabar dalam membimbing memberi arahan serta motivasi
4. Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai
5. Desy Septriana Sari, A.Md selaku Pj Desa Kayu Batu beserta jajarannya yang selalu mempermudah dalam segala urusan penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini
6. Kedua orang tua saya yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan serta doa sampai berada di titik ini
7. Para sahabat yang selalu menemani susah maupun senang, yang telah banyak membantu dan menyemangati dari awal sampai akhir semester yaitu mba Siti Ma'rifah, mba Shinta Rosadi, mba Sekar Handayani, Aprina, Qori Wulandi Safitri.

8. Teman-teman KKN-DR kelompok 411 knn desa Bonglai dusun Bangun Sari Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan yaitu A. Bahri Ghozali, Agus Sujepri, Latifah Puji Astuti, Lisnawati, Lulu Atunnisah, Sarmawati, dan Rendi Nugraha Saputra
9. Teman-teman seperjuangan kelas AKS A Angkatan 2019 selama 4 tahun yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Dukungan dan motivasi dari seluruh keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala bimbingan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini penulis buat, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan ilmu khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca lainnya.

Bandar Lampung, 30 September 2023
Penulis

Sinta Amelia
1951030362

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Stewardship Theory.....	18
B. Akuntansi Sektor Publik.....	19
C. Pengalokasian Dana Desa	25
D. Kinerja Pemerintah Desa.....	30
E. Penerapan Akuntansi sektor publik dan Pengalokasian Dana Desa dalam Perspektif Islam pada Desa Kayu Ba	34
G. Kerangka Pikir.....	36

BAB III	DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	39
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	39
B.	Penyajian Fakta dan Data Penelitian	42
BAB IV	ANALISIS PENELITIAN	54
A.	Analisis penerapan akuntansi sektor publik pada pemerintah desa Kayu Batu	54
B.	Analisis Pengalokasian Dana Desa pada Desa Kayu Batu	56
C.	Analisis Penerapan akuntansi sektor publik dan pengalokasian dana desa dalam perspektif Islam pada pemerintah desa Kayu Batu untuk meningkatkan kinerja	60
BAB V	PENUTUP	62
A.	Simpulan	62
B.	Rekomendasi	63
	DAFTAR RUJUKAN	65
	LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Alokasi Dana Desa.....	5
Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu.....	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Aplikasi Siskeudes..... 29

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar Surat Izin Riset.....	70
Gambar Surat Balasan Izin Riset.....	71
Surat Keterangan Lulus Turnitin.....	72
Hasil Turnitin.....	73
Dokumentasi Observasi.....	75
Dokumentasi Wawancara.....	75
Dokumentasi Balai Desa Kayu Batu.....	75

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah dalam skripsi agar tidak terjadi kekeliruan bagi pembaca seperti yang tertera pada penegasan judul. Oleh karena itu, diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul: “**Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengalokasian Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Kayu Batu**”. Beberapa istilah yang perlu penulis jabarkan yaitu sebagai berikut:

1. Analisis adalah ilmu yang mempelajari suatu peristiwa dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, termasuk penyebab dan duduk perkaranya.²
2. Penerapan adalah sebuah tindakan dari rencana yang dipersiapkan dengan cermat dan terperinci. Penerapan juga dilakukan setelah perencanaan dianggap selesai, menghasilkan kegiatan, tindakan, inisiatif, atau mekanisme suatu sistem yang sudah direncanakan dan untuk pencapaian tujuan kinerja.³
3. Akuntansi Sektor Publik adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau lembaga publik seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya yang dapat

² Dkk Sri Sukei Adiwimarta, Adi Sumaryo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002).

digunakan sebagai informasi bagi pihak yang membutuhkannya untuk mengambil keputusan ekonomi.⁴

4. Pengalokasian Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang dikhususkan untuk desa yang selanjutnya di salurkan melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan guna melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁵
5. Kinerja adalah sebuah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara legal, tidak melanggar hukum dan juga sesuai dengan moral ataupun etika.⁶
6. Pemerintah Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur dasar demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan juga perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.⁷

Berdasarkan pernyataan judul di atas, maka peneliti menyatakan kembali bahwa maksud dan tujuan dari judul skripsi ini yaitu adalah untuk mempelajari dan menganalisis penerapan akuntansi sektor publik dan pengalokasian dana desa dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa kayu batu.

⁴ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2019).

⁵ Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat)* (Jakarta: Kemenkeu, 2017).

⁶ Suryadi Prawirosentono, *Kebijakan Kinerja Karyawan* (Yogyakarta: BPFE, 1999).

⁷ H.A.W Widjaja, *Otonom Desa Merupakan Otonom Yang Asli, Bulat, Dan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

B. Latar Belakang

Akuntansi sektor publik sangat erat kaitannya dengan penerapan dan juga perlakuan akuntansi pada domain publik. Sektor publik itu sendiri lebih luas dan lebih kompleks daripada sektor swasta. Keluasan wilayah publik ini tidak hanya bergantung pada ragam luasnya jenis dan bentuk organisasi yang ada di dalamnya, tetapi juga karena kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, sektor publik meliputi badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah) serta unit kerja negara, BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi publik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan organisasi nirlaba lainnya.⁸

Salah satu yang menjadi prioritas pemerintah pusat dalam pembangunan desa adalah penyediaan pembiayaan desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Transfer dari pemerintah pusat/kota yang alokasi dana desanya merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota setelah dikurangi minimal 10%. Dalam hal ini, alokasi dana khusus (UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72) yang ditransfer secara bertahap, pemerintah memeriksa jumlah dana tersebut sebelum dana disalurkan. Nilai nominal yang diterima setiap desa bervariasi berdasarkan pada jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis.

Dibutuhkan efisiensi dan kapasitas yang optimal dari pemerintah desa demi mewujudkan cita-cita masyarakat desa yang lebih sejahtera dan untuk hasil dari penerapannya, otonomi desa mendorong akuntabilitas untuk meningkatkan hasil dan pelayanan publik. Efisiensi merupakan contoh tingkat keberhasilan pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan, tugas, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan organisasi. Namun demikian, keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerjanya tidak dapat diukur hanya dari segi finansial, tetapi juga harus diukur dari segi efektivitasnya. Banyak

⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018).

hal yang dapat digunakan untuk menjadi tolak ukur pembangunan desa guna meningkatkan kinerja organisasi pemerintah desa.

Hal ini tercermin dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, dan tanggungjawab atas hasil. Jika terdapat hubungan antara tujuan dan strategi yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan, maka dapat diasumsikan bahwa manajemen dana desa yang baik mempengaruhi operasional kelembagaan atau operasi manajemen keuangan yang baik dan tentunya akan menghasilkan pelaporan keuangan yang baik pula. Hal ini dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam organisasi. Penggunaan sistem akuntansi yang tepat dapat memfasilitasi pengendalian transaksi dan arah arus kas, apakah sudah konsisten dengan tujuan pengalokasian dana tersebut atau tidak.⁹

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa diawali dengan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diperbaharui dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan hukum masyarakat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹⁰

Stewardship Theory menyatakan bahwa situasi manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditujukan terhadap hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. *Stewardship Theory* mendeskripsikan tentang eksistensi pemerintah sebagai sebuah organisasi di sektor publik yang bisa dipercaya, bisa menampung aspirasi masyarakatnya,

⁹ Nyoman Sunarti et al., “Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Desa Pacung” 8, no. 1 (2018): 42.

¹⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tentang Desa,” no. 1 (2014): 2.

bisa memberikan pelayanan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan atas dana desa yang telah diamanahkan kepada pemerintah desa. Sehingga tujuan dari sebuah organisasi untuk mensejahterakan masyarakat dapat diraih secara maksimal. Untuk dapat menjalankan tanggungjawabnya, maka pemerintah desa (*Steward*) harus dapat mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya secara efektif dan juga efisien. Hal tersebut, dapat memberi penilaian masyarakat/pemerintah daerah/pemerintah pusat terhadap pemerintah desa akan lebih memuaskan tentunya, bagi pemerintah desa karena pada dasarnya *Stewardship Theory* telah menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan juga kesuksesan. Kesuksesan yang diraih pemerintah desa dinilai oleh *principal* yang menunjukkan bahwa pemerintah desa bekerja dengan mengutamakan kepentingan dari sebuah organisasi. berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini menggunakan *Stewardship Theory* sebagai landasan penelitian.¹¹

Desa Kayu Batu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. Berikut adalah jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima desa Kayu Batu tahun 2020-2022.

Tabel 1. 1 Jumlah Alokasi Dana Desa

No.	Tahun	Alokasi Dana Desa (Rp)
1.	2020	290.757.840
2.	2021	349.245.480
3.	2022	380.947.300

Sumber: Siskeudes 2020-2022

¹¹ Ika Asmawati, Prayitno Basuki, and Ahmad Riva'i, "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)," *E-Jurnal Akuntansi* 25 (2018): 2386–87, <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p28>.

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah Alokasi Dana Desa di Desa Kayu Batu mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Setelah melakukan wawancara dengan Bendahara Desa Kayu Batu dan mendapat informasi bahwa dana yang dialokasi masih kurang efektif dan hal ini dibenarkan oleh kepala desa Kayu Batu. Kurang efektifnya pengalokasian dana desa tersebut disebabkan terbatasnya anggaran dana desa oleh pemerintah pusat dan pengaruh harga pasar yang meningkat setiap tahunnya. Karena penggunaan dana desa gagal dalam merencanakan dan mengelola menjadikan penggunaan dana desa yang tidak digunakan sesuai peruntukan atau tidak sesuai dengan kebutuhan desa.

Hal ini juga telah diakui oleh pemerintah desa Kayu Batu dalam mengatur dan mengelola transparansi dan akuntabilitas keuangan. Masih terdapat kekurangan, sehingga mereka masih mengharapkan tanggapan, masukan, dan saran yang membangun sehingga dapat menyempurnakan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa (LKPPD) yang akuntabel.

Berdasarkan riset terdahulu, telah banyak diteliti sebelumnya oleh para ahli seperti “Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah desa dan sistem akuntansi keuangan desa yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah di desa Pacung. Keterbaruan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 1) fokus penelitian terdahulu adalah pada pengelolaan keuangan desa dan sistem akuntansi keuangan desa, sementara fokus penelitian sekarang adalah pada penerapan akuntansi sektor publik dan pengalokasian dana desa pada penggunaan dana desa secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa; 2) penelitian terdahulu dilakukan di desa Pacung sementara penelitian sekarang dilakukan di desa Kayu Batu, meskipun keduanya membahas tentang peningkatan kinerja pemerintah desa.

berikutnya yaitu “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nahaaya Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan utara” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa setiap tahunnya di Desa Nahaaya secara keseluruhan telah berjalan seperti yang diharapkan. Terbukti dana yang digunakan sesuai dengan peraturan yang baik dan benar. Meskipun sudah berjalan dengan baik, tentu saja masih terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa misalnya karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang disebabkan oleh Pendidikan mereka. Keterbaruan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah: 1) fokus penelitian terdahulu yaitu pada pengelolaan alokasi dana desa di Desa Nahaaya sementara pada penelitian sekarang lebih fokus pada analisis penerapan akuntansi sektor publik dan pengalokasian dana desa dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa Kayu Batu; 2) lokasi penelitian terdahulu dilakukan di desa Nahaaya Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sementara penelitian sekarang dilakukan di desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan; 3) tujuan penelitian terdahulu adalah untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa di Desa Nahaaya sementara penelitian sekarang bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi sektor publik dan pengalokasian dana desa dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa Kayu Batu.

Berikutnya adalah “Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Sistem Keuangan Pemerintah Desa” hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Gendingan sudah mematuhi dan dijalankan sesuai dengan peraturan berlaku dan dinilai akuntabel dalam penyajian laporan pertanggungjawabannya. Terdapatnya sistem informasi akuntansi keuangan berbasis desa yaitu siskeudes yang membantu perangkat desa semakin serius dalam menyusun laporan akuntansi keuangan dana desa. Keterbaruan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah fokus penelitiannya yaitu implementasi akuntansi

sektor publik dalam sistem keuangan desa dan lebih mengevaluasi keefektifan implementasi tersebut, sementara penelitian sekarang memiliki fokus yang lebih spesifik untuk mengevaluasi apakah penerapan akuntansi sektor publik dan pengalokasian dana desa berdampak pada kinerja desa Kayu Batu dalam mengelola dana desa.

Dari pemaparan latar belakang tersebut, peneliti tentunya ingin menganalisis penerapan akuntansi sektor publik dan pengalokasian dana desa dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa Kayu Batu yang dikaji dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengalokasian Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.”

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, mendeskripsikan dan menganalisis tentang analisis penerapan akuntansi sektor publik dan pengalokasian dana desa dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa kayu batu kecamatan gunung labuhan kabupaten way kanan.

Sub-fokus dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Analisis penerapan akuntansi sektor publik, fokus pada bagaimana prinsip akuntansi sektor publik diterapkan di Desa Kayu Batu, seperti perencanaan anggaran dan sistem akuntansi lainnya.
- 2) Evaluasi mengenai pengalokasian dana desa, fokus pada bagaimana dana desa dialokasikan dan digunakan di Desa Kayu Batu, apakah dana desa digunakan untuk program pengembangan masyarakat yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan apakah dana desa dipertanggungjawabkan dengan baik.

- 3) Analisis kinerja pemerintah desa, fokus pada bagaimana kinerja pemerintah desa Kayu Batu diukur dan dievaluasi bagaimana kinerja pemerintah desa dapat ditingkatkan melalui penerapan prinsip akuntansi sektor publik dan pengalokasian dana desa yang efektif.
- 4) Identifikasi hambatan dan tantangan dalam penerapan akuntansi sektor publik dan pengalokasian dana desa, fokus pada faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan prinsip akuntansi sektor publik dan pengalokasian dana desa yang efektif di desa Kayu Batu seperti kendala administratif, kekurangan sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman tentang prinsip akuntansi sektor publik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana akuntansi sektor publik yang diterapkan pada pemerintah desa Kayu Batu?
2. Bagaimana pengalokasian dana desa pada desa Kayu Batu?
3. Bagaimana akuntansi sektor publik dan pengalokasian dana desa yang diterapkan dalam perspektif Islam pada pemerintah desa Kayu Batu bisa meningkatkan kinerja?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akuntansi sektor publik yang diterapkan pada pemerintah desa Kayu Batu.
2. Untuk mengetahui pengalokasian dana desa pada desa Kayu Batu.
3. Untuk mengetahui akuntansi sektor publik dan pengalokasian dana desa yang diterapkan dalam perspektif Islam pada Desa Kayu Batu.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang penerapan akuntansi sektor publik dan pengalokasian dana desa dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa di desa Kayu Batu.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi organisasi terkait, diharapkan hasil penelitian sebagai bahan masukan atau bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kedisiplinan dan integritas dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa.

b) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan pula dapat memperluas wawasan bagi peneliti lain untuk dijadikan bahan referensi serta bahan untuk menambah ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik dan pengalokasian dana desa dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa sehingga untuk kedepannya bisa mendapatkan keterbaruannya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

saat menulis karya ilmiah ini, penulis membaca banyak jurnal yang diterbitkan sebelumnya. Hal ini penulis lakukan agar penulis dapat menambah pengetahuan dan membuat perbandingan saat menulis karya ilmiah ini. Penulis menemukan jurnal yang memiliki topik penelitian yang sama dengan jurnal tersebut, antara lain:

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan Tahun Peneliti	Persamaan	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Nyoman Sunarti, Ni Nyoman Yunita Lestari, Dkk. (2018), “Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung”.	Sama-sama membahas pada peningkatan kinerja pemerintah desa melalui pengelolaan keuangan yang baik dan penerapan sistem akuntansi yang tepat, juga sama-sama menekankan pentingnya pengalokasian dana desa yang tepat dan transparan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah desa dan sistem akuntansi keuangan desa yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah di desa Pacung.	Terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian.
2.	Noviyanti dan	Sama-sama membahas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa	Terletak pada

	Mulyana (2018) “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nahaaya Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungun Provinsi Kalimantan Utara”	tentang alokasi dana desa	pengelolaan alokasi dana desa setiap tahunnya di Desa Nahaaya secara keseluruhan telah berjalan seperti yang diharapkan. Terbukti dana yang digunakan sesuai dengan peraturan yang baik dan benar. Meskipun sudah berjalan dengan baik, tentu saja masih terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa misalnya karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang disebabkan oleh Pendidikan mereka.	fokus penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian.
3.	Erika Rahma Setiyani dan Risky Nurfadila (2021) “Implementasi Akuntansi	Sama-sama membahas penerapan akuntansi sektor publik di tingkat desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah desa Gendingan sudah mematuhi dan dijalankan sesuai dengan peraturan	Terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian,

	Sektor Publik dalam Sistem Keuangan Desa”		yang berlaku, dan akuntabel dalam laporan pertanggungjawabannya dan terdapat system informasi akuntansi siskeudes yang membantu perangkat desa semakin serius dalam menyusun laporan akuntansi keuangan dana desa.	
4.	Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo dan Agus Widodo (2016) “Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa”	Sama-sama membahas tentang pengelolaan dana desa dana system akuntansi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul yaitu rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan pemendagri No.113/2015, ditambah dengan belum adanya tenaga pendamping dari Kabupaten Boyolali untuk membantu pengelolaan dana desa.	Terletak pada fokus penelitian, tujuan penelitian, lokasi penelitian
5.	Fitri (2015) “Kinerja	Sama-sama membahas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa	Terletak pada

	Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi”	tentang alokasi dana desa dan kinerja pemerintah desa.	analisis kinerja pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Vatunonju Kabupaten Sigi belum berjalan dengan baik, karena terdapat lima dimensi yang diteliti, tiga dimensi tidak berjalan dengan baik seperti dimensi produktivitas, kualitas pelayanan, dan akuntabilitas, tetapi hanya dua yang bekerja cukup baik yaitu daya tanggap dan tanggungjawab	fokus penelitian, lokasi penelitian
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap instansi yang bertujuan untuk memperoleh data primer¹²

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah dimana peneliti sebagai instrumen dan teknik

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

pengumpulan data dianalisis yang bersifat kualitatif karena lebih menekankan pada makna.¹³

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, waktu penelitian dilakukan selama 2022/2023.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dimana data tersebut dikumpulkan oleh peneliti sendiri langsung dari sumber pertama atau tempat dilakukannya objek penelitian.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi yaitu teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Observasi ini juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain.¹⁵ Dan wawancara, yaitu pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab untuk memahami topik yang diberikan. Selanjutnya dengan dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa dokumen-dokumen baik itu tertulis, gambar maupun elektronik yang sudah ada dilapangan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis model Miles *and* Huberman, yang

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021).

¹⁴ Sugiyono.

¹⁵ Sugiyono.

menyatakan bahwa ada empat cara untuk menganalisis data kualitatif, antara lain:¹⁶

a. *Data Collection/Pengumpulan Data*

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, pengumpulan data juga dapat dilakukan selama sehari-hari bahkan berbulan-bulan, sehingga banyak informasi yang diperoleh.

b. *Data Reduction/Reduksi Data*

Mereduksi data yang bermakna merangkum, memilih hal-hal yang paling penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting seperti informasi yang terkait dengan penerapan akuntansi sektor publik dan pengalokasian dana desa.

c. *Data Display/Penyajian Data*

Setelah reduksi data selesai, data disajikan dalam bentuk teks naratif seperti catatan lapangan, tabel, bagan, atau grafik.

d. *Penarikan Kesimpulan/Concluding Drawing*

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, yang merupakan bagian akhir dari analisis data kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan jawaban atas rumusan masalah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk penjelasan singkat tentang materi yang akan dibahas, penulis menjelaskan secara singkat isi dari masing-masing bab dalam sistematika penelitian sebagai berikut:

¹⁶ Sugiyono.

I BAB I Pendahuluan

Pada bab ini meliputi penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

II BAB II Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

III BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini berisi gambaran umum objek desa Kayu Batu dan penyajian fakta dan data penelitian.

IV BAB IV Analisis Penelitian

Pada bab ini berisi analisis data penelitian dan temuan penelitian.

V BAB V Penutup

Pada bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisi simpulan dan rekomendasi atau saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Stewardship Theory

Menurut Donaldson & Davis 1989,1991 teori stewardship adalah teori yang mendeskripsikan situasi dimana manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, tetapi lebih fokus pada hasil utama mereka guna kepentingan organisasi. Oleh karena itu, teori ini memiliki landasan psikologis dan sosiologis agar para eksekutif yang bertindak sebagai manajer tidak meninggalkan organisasinya karena manajer berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori stewardship ini berpendapat korelasi yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan para pemilik. Steward akan berusaha melindungi dan meningkatkan aset organisasi dengan kinerja perusahaan. Asumsi penting stewardship bahwa manajer menyelaraskan tujuannya dengan tujuan pemilik. Namun bukan berarti steward tidak memiliki dasar-dasar dalam hidup.¹⁷

Dalam penelitian ini, *Stewardship Theory* sangat cocok untuk mendeskripsikan tentang eksistensi pemerintah sebagai sebuah organisasi di sektor publik yang bisa dipercaya, bisa menampung aspirasi masyarakatnya, bisa memberikan pelayanan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan atas dana desa yang telah diamanahkan kepada pemerintah desa. Sehingga tujuan dari sebuah organisasi untuk mensejahterakan masyarakat dapat diraih secara maksimal. Untuk dapat menjalankan tanggungjawabnya, maka pemerintah desa (*Steward*) harus dapat mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya secara efektif dan juga efisien. Hal tersebut, dapat memberi penilaian masyarakat/pemerintah daerah/pemerintah pusat terhadap pemerintah desa akan lebih memuaskan tentunya, bagi pemerintah desa karena pada dasarnya *Stewardship Theory* telah menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan juga kesuksesan. Kesuksesan yang diraih

¹⁷ Eko Raharjo, “Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi,” *The Management of Intellectual Property* 2 (2006): 39–40.

pemerintah desa dinilai oleh *principal* yang menunjukkan bahwa pemerintah desa bekerja dengan mengutamakan kepentingan dari sebuah organisasi. berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini menggunakan *Stewardship Theory* sebagai landasan penelitian

B. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan dan ekonomi suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lainnya, yang digunakan sehubungan dengan penyiapan bahan informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.¹⁸ Pengertian lain dari akuntansi di sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi, yang digunakan untuk pengelolaan dana masyarakat di beberapa lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya seperti pemerintah daerah, yayasan, BUMN, BUMD, partai politik, perguruan tinggi, dan organisasi-organisasi lainnya.¹⁹

1. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan akuntansi dalam organisasi sektor publik meliputi:²⁰

- a) Memberikan informasi yang diperlukan untuk manajemen operasi dan distribusi sumber daya yang tepat, efisien, dan ekonomis yang ditugaskan ke organisasi. Tujuan ini juga berlaku untuk pengendalian manajemen (*management control*).
- b) Memberikan informasi yang memungkinkan para manajer untuk melaporkan kinerja dan akuntabilitas untuk pengelolaan program yang tepat dan efektif sesuai

¹⁸ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, 2nd ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2019).

¹⁹ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2001).

²⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018).

dengan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan hasil kegiatan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

2. karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Karakteristik dari akuntansi di sektor publik meliputi:²¹

a. Relevan

Bersifat relevan, laporan keuangan untuk akuntansi sektor publik harus konsisten, yaitu berarti mengandung informasi yang dapat mendukung pengembalian keputusan dan evaluasi kejadian di masa lalu dan juga di masa depan.

b. Andal

Bersifat andal, laporan keuangan akuntansi sektor publik berisi informasi berguna yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan laporan keuangan sebelumnya.

c. Mudah Dipahami

Mudah dipahami artinya akuntansi dan laporan keuangan sektor publik memuat informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan, baik itu pihak yang internal maupun pihak eksternal.

d. Sistem Akuntansi Sektor Publik

Menurut peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, akuntansi sektor publik adalah sebuah seperangkat

²¹ Nevi Costari and Putri Ariella Belinda, "Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan," *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita* 1, no. 1 (2021): 62, https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421.

prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain yang sistematis untuk pelaksanaan tugas akuntansi, mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan lingkungan organisasi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah daerah juga didasarkan pada proses atau prosedur yang menggunakan cara manual ataupun terkomputerisasi. Prosedur yang dimaksud adalah pencatatan, klasifikasi, dan ringkasan transaksi keuangan atau peristiwa yang terkait dengan pelaporan untuk pelaksanaan APBD yang terkait dengan pengeluaran atau belanja pemerintah daerah.²²

Sistem akuntansi keuangan sektor publik tersebut dapat dijelaskan secara rinci melalui periode akuntansi, yaitu periode atau tahapan sistem akuntansi. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:²³

- a. Merekomendasikan transaksi keuangan sebagai bukti dan melakukan analisis atas transaksi keuangan tersebut;
- b. Mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal;
- c. Meringkas dalam buku besar atau sering disebut dengan memposting buku besar;
- d. Menentukan saldo-saldo buku besar yang diakhiri periode dan disajikan dalam neraca saldo;
- e. Menyesuaikan buku besar berdasarkan informasi terbaru;
- f. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menyajikannya dalam neraca saldo setelah penyesuaian (NSSP);
- g. Menyusun laporan neraca saldo setelah penyesuaian (NSSP);
- h. Menutup buku besar;
- i. Menyajikan dalam neraca saldo setelah tutup buku.

²² Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, 2nd ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2007).

²³ Slamet Sugiri, *Akuntansi Manajemen*, ed. UUP AMP YKPN (Yogyakarta, 2001).

3. Pencatatan Akuntansi Sektor publik

Ada beberapa macam cara untuk melakukan pencatatan akuntansi umum dalam akuntansi di sektor publik, sebagai berikut:

a. Akuntansi Anggaran (*Budgetary Accounting*)

Akuntansi anggaran adalah sebuah cabang akuntansi dan interpretasi pendapatan dalam penerapan APBN dan APBD. Tujuan utama anggaran adalah untuk memantau atau mengendalikan anggaran. Akuntansi anggaran juga memberikan informasi yang berguna untuk pengendalian dan pemeriksaan anggaran, sehingga nantinya dapat diketahui penggunaan anggaran, ekonomi, efisiensi, dan efektifitas dan situasi keuangan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah.

b. Akuntansi Kas (*Cash Accounting*)

Akuntansi kas atau pembukuan adalah metode akuntansi tertua dalam satu sejarah akuntansi yang telah bertahan selama berabad-abad bahkan sampai ribuan tahun. Sampai saat ini, akuntansi kas di sektor publik tersebar luas dan digunakan oleh organisasi nirlaba. Operasi akuntansi yang terkait dengan penerimaan dan pembayaran, serta saldo kas dibuku kas.

c. Akuntansi Akrual (*Accrual Accounting*)

Akuntansi akrual atau periodik adalah metode memasukkan data atau membuat akun besar yang digunakan dalam organisasi bisnis. Namun, kini organisasi sektor publik dan nirlaba juga didorong untuk menggunakan akuntansi akrual. Ini sangat berguna untuk menetapkan biaya untuk layanan dan saat menetapkan harga atau tarif untuk layanan.

d. Akuntansi Komitmen (*Commitment Accounting*)

Akuntansi komitmen digunakan untuk sebagian besar akun dan mencakup semua transaksi dari akuntansi akrual dan akuntansi kas. Sebuah usaha diakui setelah pesanan dilakukan yang diberikan untuk pembelian barang atau jasa, saat menyelesaikan kontrak kerja, saat dana dikeluarkan untuk kewajiban jangka panjang harus dipenuhi.

e. Akuntansi Dana (*Fund Accounting*)

Penggunaan akuntansi dana pada akuntan publik yang ada di Indonesia yang dimungkinkan karena sistem anggaran pemerintah telah meluncurkan beberapa program khusus yang membutuhkan akuntansi dana program. Oleh karena itu, asal dan penggunaan dana serta perimbangan dana program harus ditentukan secara terpisah. Akuntansi dana adalah metode akuntansi yang membagi sumber daya menjadi berbagai jenis dana untuk menentukan asal dan penggunaan pada dana tersebut. Tujuan dari akuntansi dana adalah mengelola serta bertanggung jawab atas dana tersebut, menentukan posisi keuangan, rencana, anggaran, evaluasi hasil kerjanya.

f. Standar Akuntansi Berbasis Akrual

Dalam praktiknya, sistem akuntansi pemerintah Indonesia basis akrual digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban, dan modal keuangan. Aset akan diakui pada saat kepemilikan diperoleh atau dialihkan dan pada saat penguasaannya berpindah. Sementara kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan saat kewajiban timbul.²⁴

²⁴ Dkk Kieso, Donald E., *Akuntansi Intermediate*, ed. Erlangga, 12th ed. (Jakarta, 2008).

Dalam UU No. 17 tahun 2003 pasal 31 tentang keuangan negara, laporan keuangan yang harus disajikan setidaknya-tidaknya meliputi:²⁵

- a. Laporan Realisasi APBDes, yaitu laporan yang memberikan informasi tentang pelaksanaan pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA) yang masing-masing dapat dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam penyajiannya, laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas, pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat menerima rekening kas umum negara/daerah. Adapun sisa lebih/kurang dalam pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL);
- b. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan modal. saat menyajikan neraca, sekurang-kurangnya seperti kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas;
- c. Laporan Arus Kas, laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas; dan
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan, laporan ini sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan yaitu:

²⁵ konsep tual Pemerintah, "DHendianto-BiroHukum BPK-RI/5/26/2008 1," no. 1 (2003): 16.

- 1) Informasi mengenai kebijakan keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN/APBD, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target;
- 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- 3) Informasi tentang penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih guna diterapkan atas setiap transaksi;
- 4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang belum disajikan dalam lembar laporan keuangan;
- 5) Pengungkapan informasi untuk pos-pos asset dan kewajiban yang timbul, dengan menerapkan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya; dan
- 6) Tambahan informasi yang diperlukan untuk penyajian laporan yang wajar.

C. Pengalokasian Dana Desa

1. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa adalah dana dari pemerintah daerah untuk desa yang sumber dananya diperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang kemudian disalurkan ke daerah.²⁶

²⁶ Bambang T Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Bandung, 2011).

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Desa Nomor 72 Tahun 2005, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diterima kabupaten/kota sekurang-kurangnya 10% untuk desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten /kota untuk desa paling sedikit adalah 10%.²⁷

Menurut peraturan daerah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dalam peraturan desa.²⁸

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada asas:²⁹

- a. Asas Pemerataan, adalah besar kecilnya pembagian dana desa yang sama untuk semua desa atau dikenal dengan nama alokasi dana desa minimal (ADDM);
- b. Asas Keadilan, adalah tingkat penyaluran dana besarnya bagian alokasi dana desa didasarkan pada nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan menggunakan rumus variabel tertentu seperti kemiskinan, jumlah penduduk,

²⁷ Peraturan Pemerintah Dalam Negeri, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,” 2007.

²⁸ Muhammad Iqbal and Ahmad Toha NurdiIn, “Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add) Dan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa Pada Pemerintahan Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung,” *Jurnal Akuntansi* 10, no. 3 (2019): 4.

²⁹ Heru Romansjah Chabib Soleh, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: Fokus Media, 2014).

pendidikan dasar, kesehatan dan lain sebagainya, dengan nama lain disebut juga alokasi dana Desa Proporsional (ADDP), yaitu besarnya persentase perbandingan antara asas pemerataan dan asas keadilan yaitu besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) serta besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Tujuan Alokasi Dana Desa

Tujuan dari pelaksanaan penyaluran alokasi dana desa antara lain:³⁰

- a. Mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan juga pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa;
- d. Mengamalkan nilai-nilai keagamaan, dan sosial budaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
- e. Meningkatkan ketentraman dan juga ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa untuk pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan serta gotong royong pada masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa (ADD) benar-benar terbuka (transparan) guna meningkatkan kebutuhan pelayanan masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya, yang tentunya masih banyak

³⁰ Hanif. Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011).

dibutuhkan masyarakat desa yang akan diputuskan melalui musyawarah desa.³¹

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dapat dinilai dari segi uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang, serta terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dapat dilakukan dalam tahapan yang berbeda, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan sampai tahap pertanggungjawaban yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Otonomi dan reformasi daerah merupakan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Banyaknya jumlah aparatur desa merupakan peluang baru yang dapat membuka peluang bagi perangkat desa untuk mengelola desa.³²

Pengalokasian dana desa tentunya harus transparan agar tidak terjadi penyelewengan dana dan kecurigaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan desa dapat berlangsung secara kondusif.

4. Aplikasi SISKEUDES

Aplikasi siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) yang dirilis sejak tanggal 13 Juli 2015. Aplikasi siskeudes ini bertujuan untuk mempermudah pemerintah desa untuk pengelolaan keuangan agar menjadi lebih optimal.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda

³¹ Chabib Soleh, *Pengelolaan Keuangan Desa*. 2013

³² marlin Sekenil dan Elius Heluka, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Kampung Amuma Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 12 (2021): 95–96.

meneguhkan kembali tekadnya untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai yang di amanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan berdasarkan Pancasila, PP Nomor 43 Tahun 2014 Jo PP 47 Tahun 2015, Pemendagri Nomor 113 dan 114 Tahun 2014, dan PMK 93 Tahun 2015.

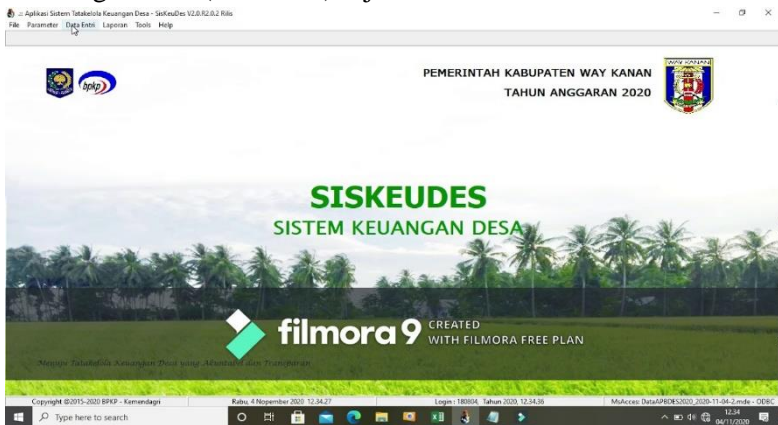
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebelumnya dikenal dengan nama Sistem Informasi Daerah (SIMDA). Bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Selain itu, BPKP juga berkoordinasi dengan KPK guna menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES.

Proses penginputan sekali yang sesuai dengan transaksi yang ada dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diantaranya:

- Dokumen Penatausahaan:
 - Bukti Penerimaan;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - Surat Setoran Pajak (SSP);
 - Dan dokumen lainnya.

- Laporan-Laporan:
 - Laporan Penganggaran (APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana);
 - Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan register dokumen penatausahaan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Desy Septriana Sari, S.Pd selaku PJ kepada desa “Meski dalam penerapannya terkadang masih terdapat kesulitan dalam berbagai hal, tetapi kami sebagai pemerintah desa dituntut harus bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik (*Good Village Governance*)”. Desa Kayu Batu ini telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) sejak tahun 2017.



Gambar 2.1 Aplikasi Siskeudes Kabupaten Way Kanan

D. Kinerja Pemerintah Desa

1. Pengertian Kinerja

Secara terminology, kinerja adalah terjemahan dari kata *performance*, kata kinerja tersusun dari dua kata yaitu “Kinetika” yang artinya kemampuan atau prestasi dan kata “Kerja”. Dalam kata kinerja mengandung pengertian kemampuan kerja atau prestasi kerja. Kata kinerja yang merupakan padanan kata *Performance* yaitu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah organisasi yang disesuaikan dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal dan sesuai dengan moral dan

juga etika.³³ Kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya guna melaksanakan pekerjaan dan ditentukan oleh interaksi antara kemampuan dan motivasi.³⁴ Dari pengertian mengenai kinerja, maka dapat dipahami bahwa kinerja adalah sebuah ukuran yang mendeskripsikan sejauh mana sebuah organisasi telah melaksanakan kegiatan sehingga hasilnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik itu dari segi kualitas, maupun kuantitas yang berdasarkan standar ketenagakerjaan tertentu. Kinerja individu ini akan tercapai bila didukung oleh atribut individu, upaya kerja, dan dukungan organisasi. Dengan kata lain, kinerja individu adalah hasil dari:³⁵

- a. Atribut Individu, yaitu yang menentukan kemampuan untuk melakukan sesuatu, meliputi faktor individu (kemampuan dan keahlian) dan faktor psikologis (persepsi, sikap, kepribadian dan lain sebagainya);
- b. Upaya Kerja, yaitu yang membentuk keinginan untuk mencapai sesuatu; dan
- c. Dukungan Organisasi, yaitu yang memberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu meliputi sumber daya, kepemimpinan, lingkungan kerja, dan lain sebagainya.

³³ Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009).

³⁴ Pasolong Harbani, *Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008).

³⁵ Serpiner, "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desasempayang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau," *EJournal Pemerintahan Integratif* 4, no. 2 (2016): 194.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kinerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah organisasi yaitu:³⁶

- a. *Personal Factor*, yaitu tingkat keterampilan, kompensasi yang dimiliki, motivasi serta komitmen individu;
- b. *Leadership Factor*, yaitu kualitas dukungan yang diberikan oleh manajer dan tim leader;
- c. *Team Factor*, yaitu kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja;
- d. *System Factor*, yaitu sistem kerja dan fasilitas yang diberikan oleh organisasi;
- e. *Contextual/Situational Factor*, yaitu tingginya tingkat tekanan serta perubahan lingkungan internal dan eksternal.

3. Penilaian Kinerja Organisasi

Sebuah organisasi bisa dikatakan efektif jika tujuan dari suatu organisasi atau nilai-nilai yang sebagaimana telah ditetapkan untuk mencapai visinya. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholders dari sebuah organisasi yang bersangkutan.³⁷

Penilaian kinerja juga dapat diartikan sebagai urusan sistematis, tentang kekuatan atau kelebihan serta kelemahan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang atau kelompok.³⁸ Adapun ukuran dan tingkat kinerja sebuah organisasi publik secara lengkap yaitu:³⁹

- a. Produktivitas, tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan. Produktivitas juga pada umumnya dapat

³⁶ Wibowo, *Manajemen Kinerja*.

³⁷ Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, Dan Isu* (Yogyakarta: Gava Media, 2014).

³⁸ Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).

³⁹ Dkk. Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017).

- dipahami secara luas sebagai rasio antara input dan output. *General Accounting Office* (GAO) mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar sebuah pelayanan publik itu dan memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator yang penting;
- b. Kualitas Layanan, merupakan isu yang selalu berkaitan dengan kualitas layanan dan menjadi semakin penting dalam suatu penjelasan kinerja organisasi pelayanan publik, hal tersebut dikarenakan banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja dalam sebuah organisasi publik;
 - c. Responsivitas, kemampuan suatu organisasi untuk memahami kebutuhan masyarakat, menyusun jadwal dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat;
 - d. Responsibilitas, pelaksanaan kegiatan organisasi publik ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada administrasi sesuai dengan kebijakan dari sebuah organisasi.
 - e. Akuntabilitas, kinerja seharusnya bisa dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai dan norma yang telah berlaku dalam masyarakat.

4. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah sebuah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah.⁴⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam lingkup peraturan, pembinaan, pengelolaan, penyediaan fasilitas, jasa dan lain sebagainya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, terutama perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan biaya, pelayanan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan dan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan bagi publik. Tentunya dalam penyelenggaraan pelayanan bagi publik tersebut harus ada prinsip-prinsip yang dapat menjadi pedoman bagi para penyelenggara dalam memberikan suatu pelayanan.⁴²

E. Penerapan Akuntansi sektor publik dan Pengalokasian Dana Desa dalam Perspektif Islam pada Desa Kayu Batu

Dalam perspektif Islam, Allah SWT telah mengatur tentang akuntabilitas melalui Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

⁴⁰ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Dan Implementasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).

⁴¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik," *Bphn.Go.Id* 2003, no. 1 (2009): 3.

⁴² Komarudin, *Reformasi Birokrasi Dan Palayanan Publik* (Bandung: Genesindo, 2014).

Artinya: “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*”.

Maksud dari ayat tersebut adalah untuk menekankan bahwa pentingnya akuntabilitas dalam mengelola harta untuk amanah. Karena ketika seseorang diberi tanggungjawab untuk mengelola harta orang lain baik itu sedikit maupun banyak mereka harus memastikan harta tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya secara transparan dan siap menerima konsekuensi apabila terjadi pelanggaran.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa untuk bisa meningkatkan kinerja sebuah organisasi perlu dilakukan evaluasi penilaian terhadap organisasi yang akan dinilai kinerjanya. Tentunya setiap orang memiliki pandangan dan cara tersendiri dalam melakukan penilaian dari sebuah organisasi.

Dalam perspektif Islam, transparansi juga telah diatur dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui*”.

Maksud dari ayat tersebut adalah kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk mengelola harta kekayaan dan keuangan dengan baik dan benar, transparan dan juga akuntabel.

Dalam perspektif Islam, Allah SWT telah mengatur tentang kinerja melalui Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”⁴³

Maksud dari ayat tersebut adalah manusia diberi perintah oleh Allah swt untuk beramal atau beribadah tanpa pamrih atau beribadah dengan ikhlas

F. Kerangka Pikir

Untuk memahami masalah yang sedang dibahas, maka perlu adanya kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam meneliti masalah yang digambarkan sebagai berikut:

1. Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Kayu Batu

Akuntansi Sektor Publik dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja mereka. Dengan memiliki sistem akuntansi yang baik, pemerintah desa dapat menghasilkan laporan keuangan dan kinerja yang baik dan transparan kepada publik, hal inilah yang dapat membantu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi.

Dengan demikian, analisis penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja pemerintah desa sangatlah penting untuk diperhatikan, pemerintah desa juga harus dapat memperbaiki sistem akuntansi dan meningkatkan kesadaran serta keterampilan pegawai dalam mengelola keuangan dan pelaporan kinerja.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Quran Kemenag* (Jakarta, 2002).

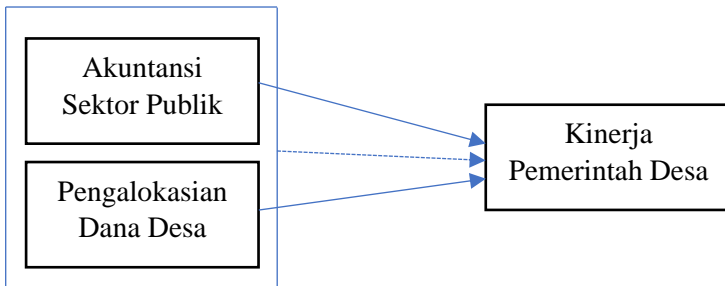
2. Analisis Pengalokasian Dana Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Kayu Batu

Pengalokasian dana desa ini merujuk pada bagaimana pemerintah desa mengelola dan juga menggunakan alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pengalokasian dana desa dapat mencakup aspek-aspek seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan pelaporan. Sementara untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa, yaitu merujuk pada kemampuan pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Kinerja pemerintah desa juga dapat diukur dengan indikator seperti transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas efisiensi, dan berkelanjutan program atau kegiatan yang dilaksanakan.

3. Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengalokasian Dana Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Kayu Batu

Dengan menerapkan akuntansi sektor publik secara efektif dan pengalokasian dana desa dengan bijaksana, pemerintah desa dapat memastikan pengelolaan yang transparan, akuntabel dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam mencapai tujuan pembangunan lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Keterangan:



: Pengaruh Secara Parsial



: Pengaruh Secara Simultan

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, 2001.
- . *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. 2nd ed. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Chabib Soleh, Heru Romansjah. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media, 2014.
- Dwiyanto, Dkk. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017.
- Harbani, Pasolong. *Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Keban, Yeremias T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Kieso, Donald E., Dkk. *Akuntansi Intermediate*. Edited by Erlangga. 12th ed. Jakarta, 2008.
- Komarudin. *Reformasi Birokrasi Dan Palayanan Publik*. Bandung: Genesindo, 2014.
- Kusufi, Abdul Halim dan Muhammad Syam. *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- . *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. 2nd ed. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.
- . *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.

- . *Otonomi Manajemen Dan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2002.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Prawirosentono, Suryadi. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Soemantri, Bambang T. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung, 2011.
- Sri Sukesu Adiwimarta, Adi Sumaryo, Dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*,. Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Sugiri, Slamet. *Akuntansi Manajemen*. Edited by UUP AMP YKPN. Yogyakarta, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- . *Metodologi Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Wibowo. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.

Widjaja, H.A.W. *Otonom Desa Merupakan Otonom Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Jurnal:

Asmawati, Ika, Prayitno Basuki, and Ahmad Riva'i. "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)." *E-Jurnal Akuntansi* 25 (2018): 2386–87.

Erika Rahma Setiyani and Risky Nurfadila. "Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Sistem Keuangan Pemerintah Desa." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita* 1, no.2 (2021):74.

Fitri. "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Votunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi." *E-Jurnal Katalogis* 3, no.11 (2015): 4.

Heluka, marlin Sekenil dan Elius. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Kampung Amuma Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 12 (2021): 95–96.

Herman Lawelai. "Analisis Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1. No. 1 (2022): 30.

- Ika Agustina and Eko Joy Prananta Sembiring. "Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara." *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah* 6, no.1 (2018):20-21.
- Iqbal, Muhammad, and Ahmad Toha NurdiIn. "Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add) Dan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa Pada Pemerintahan Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung." *Jurnal Akuntansi* 10, no. 3 (2019): 4.
- Kodir Siregar. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 11, no. 1 (2018): 52-53.
- Nevi Costari, and Putri Ariella Belinda. "Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan." *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita* 1, no. 1 (2021): 58–77.
- Raharjo, Eko. "Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi." *The Management of Intellectual Property* 2 (2006): 39–40.
- Serpiner. "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desasempayang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau." *EJournal Pemerintahan Integratif* 4, no. 2 (2016): 194.
- Sunarti, Nyoman, Ni Nyoman, Yunita Lestari, Putu Purnama Yanti, Luh Gede, Widya Asty D, Ni Komang, and Leli Mayuni. "Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Desa Pacung" 8, no. 1 (2018): 42.

Undang-Undang:

Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tentang Desa,” no. 1 (2014): 2.

———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.” *Bphn.Go.Id* 2003, no. 1 (2009): 3.

———. “Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,” 2007.

Al-Quran:

RI, Kementerian Agama. *Quran Kemenag*. Jakarta, 2002.

RI, Kementerian Keuangan. *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat)*. Jakarta: Kemenkeu, 2017.